



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **“ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENURUNAN KEMISKINAN di KABUPATEN SIJUNJUNG”.**

**SKRIPSI**



**OKKY MUS ERVA  
06151042**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**



No. Alumni Universitas

Okky Mus Erva

No. Alumni Fakultas

**BIODATA**

a) Tempat/tanggal lahir : Sijunjung/ 25 Mei 1988 b) Nama Orang Tua : Mus Erva & Nurmi Samsir c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) NO BP : 06151042 f) Tanggal Lulus : 01 Februari 2012 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK : 2,83 i) Lama Studi : 5 tahun 5 bulan h) Alamat Orang Tua : Prumnas Salasah Indah Blok G13 Muaro Sijunjung Kab. Sijunjung

**Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Kemiskinan Di Kabupaten Sijunjung**

Skripsi S1 oleh: Okky Mus Erva Pembimbing Skripsi: Drs. Masrizal, M.Soc.Sc

**Abstrak**

Studi ini meneliti tentang pengaruh PDRB, Belanja Publik, Angkatan Kerja dan Kebijakan Pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh variabel PDRB, Belanja Publik, Angkatan Kerja dan Kebijakan Pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan *time series*. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, variabel Belanja Publik berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, variabel Angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, variabel Kebijakan Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung. Sehingga di harapkan pemerintah Kabupaten Sijunjung meningkatkan total produksi barang dan jasa dengan memberi peran masyarakat sebagai aktor utama atau subyek pembangunan sedangkan pemerintah sebagai fasilitator. Serta pengalokasian belanja publik terhadap sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menampung tenaga kerja yang masih miskin.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 01 Februari 2012

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Drs. Masrizal, M.Soc.Sc	Drs. Zulkarnain Ras, M.Si	Fery Andrianus, SE.M.Si

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, salawat dan salam disampaikan kepada Rasullullah SAW, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Kemiskinan Di Kabupaten Sijunjung”**. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan panjang dalam meraih masa depan. Untuk itu penulis mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca semua agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Bapak Masrizal, Drs, M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Zulkarnain Ras, Drs.M.Si dan Bapak Feri Adrianus, SE, M.Si selaku pembahas skripsi yang telah banyak memberikan saran, pendapat, serta dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

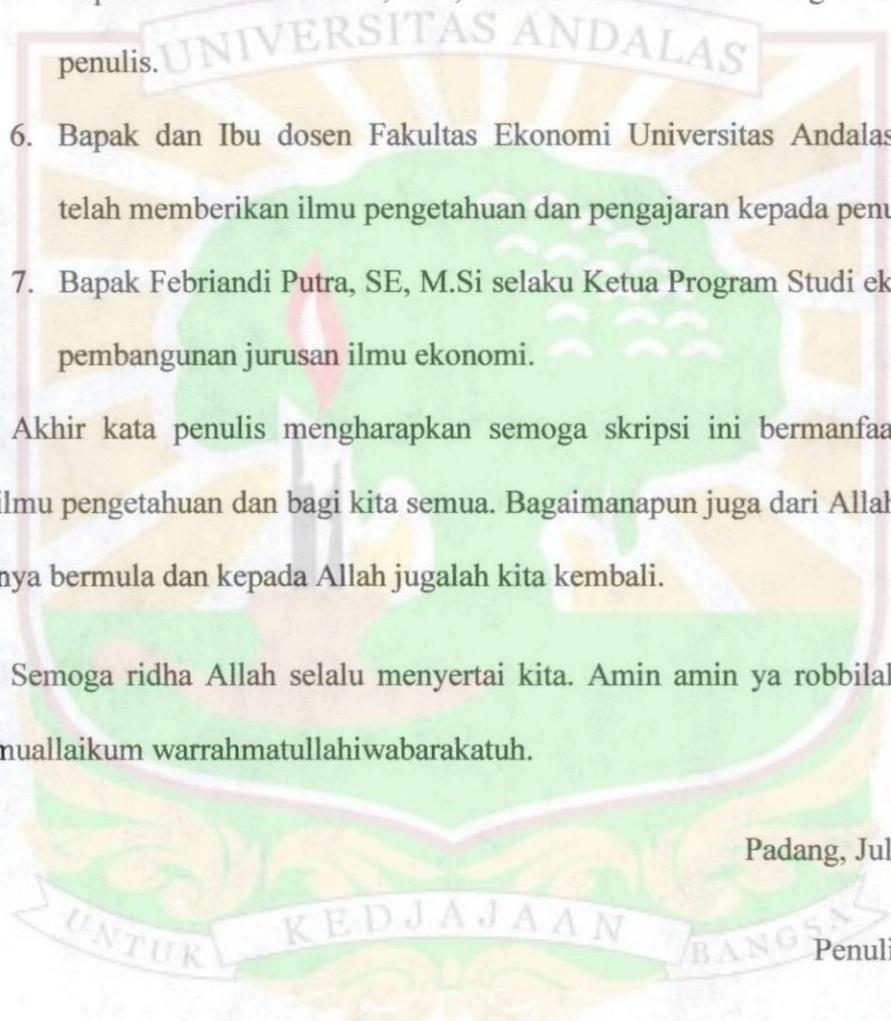
3. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Prof. Dr. Syafruddin Karimi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Zamzami Munaf, Drs, M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran kepada penulis.
7. Bapak Febriandi Putra, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi ekonomi pembangunan jurusan ilmu ekonomi.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan bagi kita semua. Bagaimanapun juga dari Allah SWT semuanya bermula dan kepada Allah jugalah kita kembali.

Semoga ridha Allah selalu menyertai kita. Amin amin ya robbilalamin, assalamuallaikum warrahmatullahiwabarakatuh.

Padang, Juli 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>V</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>VI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Hipotesis .....	8
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	11
2.1.1 Konsep Kemiskinan.....	11
2.1.1.1 Ukuran Kemiskinan .....	13
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi .....	17
2.1.3 Belanja Publik .....	25
2.1.4 Angkatan Kerja .....	28
2.1.5 Kebijakan Pemerintah.. ..	30
2.2. Hubungan Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen.....	34
2.1.1 Hubungan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan .....	34
2.1.2 Hubungan Belanja Publik terhadap Tingkat Kemiskinan .....	35

2.2.3 Hubungan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan .....	37
2.2.4 Hubungan kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan.....	38
2.3 Tinjauan Literatur .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Data dan Sumber Data .....	43
3.2 Pembentukan Model .....	44
3.3 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional .....	46
3.4 Metode Analisis dan Pengolahan Data .....	50
3.4.1 Analisa Deskriptif .....	50
3.4.2 Analisa Kuantitatif .....	50
3.5 Uji statistik .....	51
3.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual.....	52
3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	53
3.5.3 Uji Signifikansi Determinasi (Uji $R_2$ ).....	54
<b>BAB IV Gambaran Umum</b>	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	56
4.1.1 Kondisi Geografis.....	56
4.2. Analisis Data .....	58
4.2.1 Kemiskinan .....	58
4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	61
4.2.3 Belanja Publik .....	63
4.2.4 Angkatan Kerja .....	65

4.2.5 Kebijakan Pemerintah .....	67
<b>BAB V Analisis dan Pembahasan</b>	
5.1. Analisis Regresi .....	71
5.1.1 Interpretasi Hasil Penelitian .....	71
5.1.2 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t) .....	73
5.1.1 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan.....	73
5.1.2 Pengaruh Belanja Publik terhadap Tingkat Kemiskinan.....	74
5.2.4 Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan.....	75
5.2.5 Pengaruh kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan.....	75
5.1.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ... ..	76
5.1.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R <sup>2</sup> ) .....	76
5.2. Implikasi Kebijakan.....	77
<b>BAB VI Kesimpulan dan Saran</b>	
6.1. Kesimpulan .....	80
6.2. Keterbatasan .....	81
6.3. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

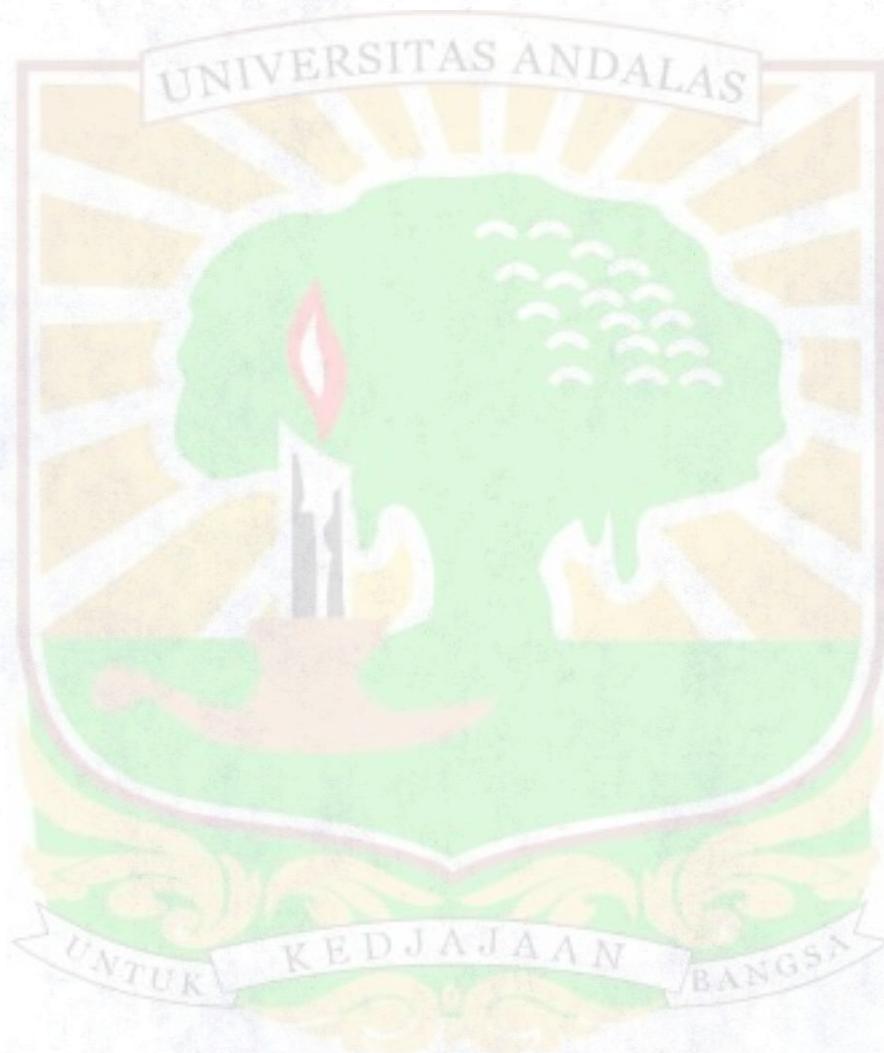
## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1:	Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung.....	57
Tabel 4.2:	Persentase Kemiskinan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2001– 2010.....	59
Tabel 4.3:	PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 di Kabupaten Sijunjung Tahun 2001 – 2010 .....	62
Tabel 4.4:	Belanja Publik Atau Belanja Langsung di Kabupaten Sijunjung Tahun 2001 – 2010 .....	63
Tabel 4.5:	Jumlah Angkatan Kerja di Kabupten Sijunjung Tahun 2001-2010.....	66
Tabel 5.1:	Hasil pengujian dengan menggunakan persamaan regresi Berganda.....	71
Tabel 5.2:	Koefisien korelasi PDRB, Belanja Publik, Angkatan Kerja dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2001-2010.....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Variable Penelitian

Lampiran 2 Analisis Regresi Linear Berganda



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan hingga kini masih menjadi suatu fenomena penting sepanjang sejarah pembangunan Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup (*safety life*), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani di desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit (Sahdan, 2004 dalam Putra, 2007).

Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dapat berbeda di setiap wilayah. Masalah kemiskinan di pedesaan nampaknya erat kaitannya dengan masalah sektor pertanian, sedang di daerah perkotaan, kemiskinan hampir terjadi di semua sektor dan lebih kompleks. Di pedesaan, kepemilikan atau penguasaan lahan pertanian yang sempit menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Sebagaimana

diketahui bahwa bagi petani, tanah merupakan *earning assets* yang akan menghasilkan pendapatan. Secara umum, sebagian besar petani kita merupakan petani tanaman pangan, maka kemiskinan di pedesaan biasanya dialami oleh petani komoditas pangan, khususnya padi. Karakteristik usaha tani padi adalah skala perusahaan dan penguasaan lahan yang relatif kecil, kepemilikan modal yang terbatas, serta ketergantungan pada iklim yang cukup besar. *Term of trade* hasil – hasil pertanian pangan yang kurang menguntungkan dan *bargaining position* petani yang lemah dalam melakukan penjualan hasil pertaniannya, tingginya *operational cost*, serangan hama dan penyakit, rendahnya tingkat produksi dan pasca produksi adalah faktor – faktor utama penyebab kemiskinan. Petani gurem, petani tanpa tanah, dan petani penggarap adalah bagian dari masyarakat pedesaan yang termiskin. Pendapatan dari luar sektor pertanian akan menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Namun sejatinya, tersimpan tragedi yang jauh lebih tragis di sektor pertanian, karena faktor kemiskinan penduduk di pedesaan justru karena kebijakan pemerintah. Peminggiran sektor pertanian selama lebih dari 30 tahun telah menempatkan pelaku di sektor pertanian dalam kondisi sekarat (Suripto, 2005).

Dalam sebutan yang lebih tegas, Soetomo (2003) mensymbolisasikan petani sebagai manusia yang selalu kalah. Pertama, kekalahan yang datang dari alam. Ini sesuatu yang sangat ironis bila mengingat pada awalnya kultur bercocok tanam lahir berkat anugerah kekayaan alam. Kedua, terbentuknya masyarakat dan lembaga beserta sistem kekuasaan dan politik yang ada di dalamnya. Kelembagaan tani modern misalnya, telah membuka babak baru dimana buruh tani bergantung pada

majikannya, pemasaran produksi pertanian dibawah hukum *need and demand*, bahkan harga jual produksi terancam oleh rekayasa praktek ekonomi makro. *Ketiga*, Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diangankan bisa mengatasi tradisionalitas ternyata tidak tercapai, justru sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi berubah menjadi bentuk-bentuk dominasi baru yang sangat menindas.

Diperkotaan, pertumbuhan penduduk miskin terjadi karena pertumbuhan penduduk miskin itu sendiri dan urbanisasi penduduk miskin dari pedesaan. Kemiskinan di kota diantaranya terjadi karena suplai tenaga kerja yang sangat melimpah dengan peluang kesempatan kerja yang terbatas, serta rendahnya tingkat *sallary* pada kegiatan – kegiatan marginal, disamping faktor sosial, budaya. Kemiskinan di perkotaan juga sangat berkaitan dengan kemiskinan yang terjadi di pedesaan, karena kemiskinan di pedesaan akan mendorong migrasi penduduk miskin ke daerah perkotaan (yustika, 1996 dalam suripto, 2005).

Dalam konteks upaya penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan perubahan paradigma pembangunan dari *top down* menjadi *bottom up*, dengan memberi peran masyarakat sebagai aktor utama atau subyek pembangunan sedangkan pemerintah sebagai fasilitator. Proses *bottom up* akan memberi ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam merencanakan, menentukan kebutuhan, mengambil keputusan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan (Agussalim, 2005). Melalui sistem ini, peran serta masyarakat diharapkan dapat menggerakkan perekonomian mikro, kecil dan menengah, dimana secara langsung juga ikut mendorong pertambahan hasil produksi sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan PDRB.

Pertumbuhan PDRB yang positif memperlihatkan pertumbuhan pendapatan per kapita dari setiap daerah tersebut juga positif. Hal ini nantinya akan menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan distribusi pendapatan dari masing-masing rumah tangga.

Selain itu dalam pengentasan masalah kemiskinan tersebut diperlukan juga adanya program yang efektif, efisien, dan terpadu serta berorientasi pada kemandirian dan berkelanjutan. Pelaksanaan sistem penanggulangan kemiskinan secara statis, melalui program kompensasi, bantuan langsung pangan, voucher pelayanan minimum kesehatan dan pendidikan, hanya dapat memecahkan persoalan kemiskinan jangka pendek (World Development Report, 2004). Karena dengan telah berakhirnya pelaksanaan program tersebut ternyata masih banyak masyarakat miskin yang bergantung pada alokasi bantuan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat bergantung pada program bantuan tersebut dan menjadi tidak produktif dalam dunia usaha. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dewasa ini membuat Pemerintah terpaksa harus bekerja keras untuk mewujudkan target tersebut. Diantaranya melalui memberdayakan kelompok miskin, menerapkan kebijakan ekonomi moral, melakukan pemetaan kemiskinan, melakukan program pembangunan wilayah seperti Inpres dan transmigrasi serta memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan pedesaan seperti BKD dan KCK – KUD.

Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya berhenti sampai pada program tersebut diatas. Namun juga melalui belanja publik yang ditujukan pada instansi pemerintah daerah otonom guna

membangun infrastruktur bagi masyarakat. Dari belanja publik oleh pemerintah ini diharapkan nantinya pemerintah daerah otonom dapat menyediakan layanan bagi publik, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah.

Fakta menarik yang diungkapkan oleh Bank Dunia dalam *World Development Report (2003)*, telah memicu debat menjadi kian ekstensif. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa diberbagai belahan dunia, sejumlah negara telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan dan bahkan berlangsung secara konsisten dalam satu-dua dekade, namun pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata tidak serta merta mereduksi kemiskinan. Disebutkan bahwa sedikitnya 3 (tiga) milyar penduduk bumi masih berada dalam kemiskinan (hanya memperoleh pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari).

Di Indonesia, masalah kemiskinan juga tampil secara massif (pertambahan angka kemiskinan yang berlangsung secara terus menerus). Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 relatif masih tinggi yaitu 31,02 juta atau 13,33% dari total penduduk. Bahkan jika menggunakan garis kemiskinan US\$ 2 per hari, diperkirakan angka kemiskinan berada diatas 30% (setiap 3 orang terdapat 1 orang miskin). Selain itu, angka kemiskinan juga tampak sangat rentan terhadap guncangan krisis. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat secara tajam dan berjuta-juta penduduk kembali masuk ke jurang kemiskinan. Pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin meningkat lebih

dari dua kali lipat dari tahun 1996 menjadi sekitar 49,5 juta jiwa atau 24,2% dari total penduduk (BPS, 2010).

Sumatera Barat termasuk daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi di Indonesia yaitu sekitar 9,50% (sejumlah 430.024 orang) pada tahun 2010. Apabila dibandingkan tahun 2009 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 429.250 orang, yang artinya terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 774 orang atau naik sebesar 0,03% (Susenas, 2010).

Sementara itu jumlah angka kemiskinan pada tahun 2010 di daerah Kabupaten Sijunjung yaitu sekitar 18% (sejumlah 36.292 orang). Namun bila dibandingkan dengan tahun 2009 telah berkurang sebanyak 366 orang, atau turun sebesar 0,01% (Susenas, 2010). Penurunan yang tidak begitu besar menjadikan masalah kemiskinan selalu menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

Meskipun beberapa bentuk investasi telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun fakta menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan terutama Kabupaten Sijunjung masih relatif rendah sekali, kenyataan itu diperkirakan oleh beberapa faktor antara lain : PDRB, belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Sijunjung”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas maka permasalahan yang akan menjadi objek penelitian penulis yaitu untuk melihat :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sijunjung terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana pengaruh belanja publik pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung?
3. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung?
4. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dijelaskan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.
3. Untuk menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.

4. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi masyarakat ilmiah yang berminat melakukan penelitian pada bidang yang sama khususnya analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan.

#### **1.5 Hipotesis**

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan yang positif antara PDRB dan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.
2. Diduga terdapat hubungan yang positif antara belanja publik pemerintah dan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.
3. Diduga terdapat hubungan yang positif antara angkatan kerja terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.
4. Diduga terdapat hubungan yang negatif antara dukungan pemerintah daerah terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.

#### **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu PDRB, belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah di

Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Sijunjung, dimana data yang digunakan adalah *time series* selama periode 2001-2010.

### **1.7 Sistematika penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam enam bab dengan rincian tiap bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, hipotesis dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KERANGKA TEORI DAN STUDI LITERATUR**

Berisikan pendekatan teori dan menyajikan penelitian terdahulu yang akan menjadi tinjauan literatur dalam penelitian ini.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan metode analisi data, data dan sumber data, serta variable dan definisi operasional.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Berisikan gambaran umum dan perkembangan beberapa variabel yang digunakan yaitu PDRB, belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah.

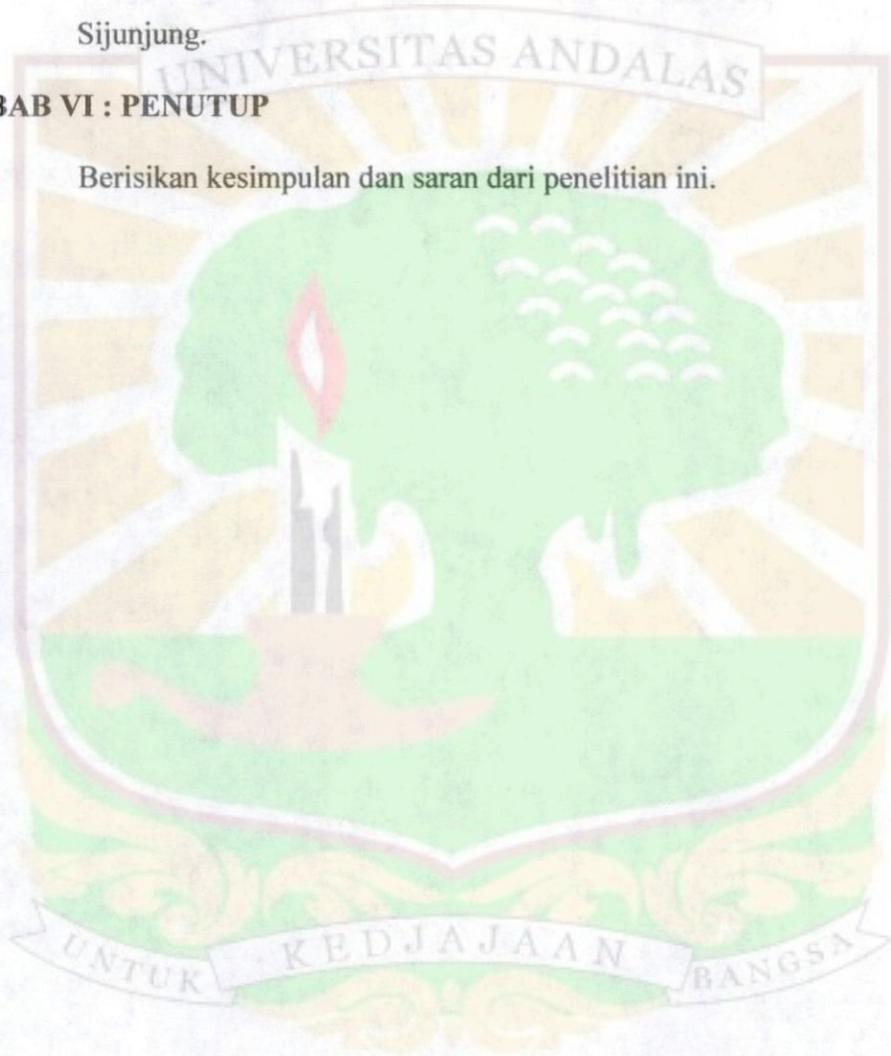
#### **BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Berisikan hasil penelitian dan implikasi kebijakan. Hasil penelitian berupa kajian tentang adanya PDRB, belanja publik, angkatan kerja,

kebijakan pemerintah dan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.  
Temuan empiris berupa pengaruh PDRB, belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN STUDI LITERATUR

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Konsep Kemiskinan

Menurut Sen (1994) kemiskinan adalah kegagalan dari beberapa kemampuan dasar untuk fungsi orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai beberapa tingkat minimal yang dapat diterima dari fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi tersebut dapat bervariasi dari seperti yang fisik dasar yaitu gizi, pakaian, rumah dan sebagainya untuk lebih berprestasi sosial yang kompleks seperti mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat, yang mampu tampil di depan umum tanpa rasa malu dan lainnya.

Definisi kemiskinan banyak ditemui didalam berbagai literatur ekonomi dan didefinisikan serta dikembangkan oleh pemerintah suatu negara. Misalnya Bapennas dalam buku panduan Desa tertinggal 1993 menyatakan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Pengertian kemiskinan sebagai tolak ukur kemakmuran yang sering digunakan dalam telahan ilmu ekonomi meliputi tinjauan terhadap aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari oleh manusia sebagai pelaku ekonomi. Namun menurut Arif (1983), kemiskinan itu pertama-tama adalah peristiwa sosial dan kedua baru merupakan peristiwa fisik dan material.

Dalam masyarakat yang berubah dengan cepat sebuah defenisi tunggal dari kemiskinan yang dapat diterima oleh semua pihak dan berlaku secara umum akan mempunyai nilai yang akan diragukan. Namun suatu konsensus yang menuju kepada standar tunggal berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diambil merupakan suatu hal yang mungkin saja dilakukan (Lains, 1980).

Menurut Djojohadikusumo (1980) terdapat dua kriteria kemiskinan :

a. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan proporsi pendapatan nasional yang diterima penduduk kelas pendapatan lainnya.

b. Kemiskinan Absolut.

Kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan.

Sedangkan ciri-ciri penduduk miskin menurut Salim (1982) yaitu:

1. Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi, seperti tanah, modal, peralatan pekerjaan dan keterampilan.
2. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.
3. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur.
4. Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (*slum arae*).

5. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah cukup) bahan kebutuhan pokok, pangan, pakaian, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, komunikasi dan kesejahteraan sosial lain.

Menurut Hendra Esmara (1986), kemiskinan sebagai gejala ekonomi akan berbeda kemiskinan sebagai gejala sosial. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi disekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan. Sebaliknya kebudayaan kemiskinan lebih banyak terletak dalam diri penduduk miskin itu sendiri seperti cara hidup, tingkah laku dan sebagainya.

Menurut BPS (2008), penduduk miskin dibedakan jadi dua yaitu miskin kronis (*chronic poor*) dan miskin sementara (*transiet poor*). Miskin kronis adalah penduduk miskin yang berpenghasilan jauh dibawah garis kemiskinan dan biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan miskin sementara adalah penduduk miskin yang berada dekat garis kemiskinan. Jika terjadi sedikit saja perbaikan dalam ekonomi, kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara ini bisa meningkat dan statusnya berubah menjadi penduduk tidak miskin.

#### **2.1.1.1 Ukuran Kemiskinan**

Kajian mengenai kemiskinan telah sangat banyak dilakukan dan dari kajian tersebut muncul istilah penduduk miskin, kemiskinan pedesaan (*rural poverty*) dan

kemiskinan perkotaan (*urban poverty*). Istilah tersebut sering digunakan dalam satu pengertian yaitu penduduk yang menderita miskin.

Untuk membedakan penduduk miskin dengan penduduk tidak miskin biasanya digunakan garis pembatas yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*). Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan inilah yang disebut dengan penduduk miskin (Esmara 1992 dalam Yakub 2004). Di dalam berbagai literatur ekonomi, penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan disebut juga dengan kemiskinan absolute (*absolute poverty*).

Batas garis kemiskinan yang dipakai di Indonesia adalah jumlah minimum pengeluaran konsumsi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ditunjukkan dalam rupiah/kapita/bulan (BPS, 2008). Dengan demikian apabila seseorang atau keluarga berada di bawah garis kemiskinan, sehingga jumlahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, maka orang atau keluarga tersebut disebut miskin absolute (Arsyad, 1997).

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (1953) dalam Mudrajad Kuncoro (1997), secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

#### A. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan

hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

#### B. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau kemiskinan dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

#### C. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya. Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut

sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*).

Di Indonesia garis kemiskinan yang dipakai adalah garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS. Menurut BPS garis kemiskinan dinyatakan sebagai besarnya rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang disetarkan dengan 2100 kalori per kapita per hari ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan bakar. Besarnya pengeluaran per kapita perhitungan garis kemiskinan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Kebutuhan lainnya selain makanan meliputi perumahan (penerangan bahan bakar, dan air bersih), pakaian, barang tahan lama, dan jasa. Untuk pengeluaran jenis makanan, BPS tidak terpaku pada salah satu jenis makanan seperti beras sebagai patokan. Dengan demikian nilai uang dari jumlah kalori dihitung berdasarkan rasio konsumsi makanan terhadap konsumsi rumah tangga total sehingga diperoleh konsumsi total minimum yang dianggap sebagai garis batas kemiskinan. Kriteria ini ditetapkan sejak tahun 1976 sampai sekarang dan terus mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga barang.

Menurut Sayogyo (dalam Yakub, 2004) mengklasifikasikan tingkat kemiskinan berdasarkan besarnya pengeluaran per kapita per tahun setara dengan harga beras yaitu:

1. Miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih rendah dari pada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun untuk daerah pedesaan dan 480 kg untuk daerah perkotaan.
2. Miskin sekali, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun untuk daerah pedesaan dan 360 kg untuk daerah perkotaan.
3. Paling miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun untuk daerah pedesaan dan 270 kg untuk daerah per kapita.

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Michael P. Todaro (2000), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia sekarang ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional.

Pada awal tahun 1970, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi sebab banyak negara yang sedang berkembang terdapat gejala adanya kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan pengangguran yang cenderung meningkat walaupun

pendapatan nasional mengalami peningkatan secara stabil. Oleh sebab itu, mulai awal tahun 1970 muncul pendapat bahwa apabila pembangunan tidak disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin, maka mustahil akan memberikan hasil yang optimal. Dalam periode tersebut munculah teori-teori baru seperti Teori Pertumbuhan dan Distribusi New-Keynesian oleh Kaldor (1955) dan Passinetti (1962). Secara umum, teori-teori ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi akan mencapai hasil yang optimal jika peningkatan pendapatan nasional disertai dengan pemerataan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat (Tambunan dalam Dian Octaviani, 2001).

Menurut Prof. Simon Kuznets (dikutip dari Budiono, 1999) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan 3 hal pokok, antara lain:

1. Laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil).
2. Persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya.
3. Pola persebaran penduduk.

Selanjutnya Boediono (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dimana penekanannya pada 3 aspek, antara lain:

1. Proses, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran dari suatu perekonomian yang melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. Output per kapita, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output per kapita dalam hal ini ada dua unsur yang penting seperti output total dan jumlah penduduk.
3. Jangka waktu, yaitu kenaikan output per kapita selama 1 – 2 tahun lalu diikuti penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Di katakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang lama (5 tahun atau lebih) mengalami kenaikan output per kapita.

Sementara menurut Michael P. Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan pada negara yang

sedang berkembang sering mengalami dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Robert Solow (dikutip dari Dornbush, et al, 2004) mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang disebut model pertumbuhan Solow. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$$Y = A \cdot F(K,L) \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja dan A merupakan teknologi. Faktor yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga pertumbuhan total faktor produktivitas.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2004), menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung

berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 1993. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2005), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian (Robinson Tarigan, 2005):

1. Menurut pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

Secara matematis dapat ditulis :

$$NI = P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_nQ_n \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana :

NI = PDB (Produk Domestik Bruto).

$P_1, P_2, \dots, P_n$  = Harga satuan produk pada satuan Masing-masing sektor ekonomi.

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$  = Jumlah produk pada satuan masing-masing sektor ekonomi.

yang dipakai hanya nilai tambah bruto saja agar dapat menghindari adanya perhitungan ganda. Yang dipakai hanya nilai tambah bruto saja agar dapat menghindari adanya perhitungan ganda.

## 2. Menurut pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor

produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung dan neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya

Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = Y_w + Y_r + Y_i + Y_p \dots\dots\dots(2.3)$$

Dimana :

Y = Pendapatan Nasional atau PDB

$Y_w$  = Pendapatan Upah/ gaji

$Y_r$  = Pendapatan Sewa

$Y_i$  = Pendapatan Bunga

$Y_p$  = Pendapatan Laba atau profit

### 3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang

tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

Secara sistematis dapat dituliskan :

$$Y = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots(2.4)$$

Dimana :

Y = PDB (Produk Domestik Bruto)

C = Pengeluaran Rumah Tangga Konsumen Untuk Konsumsi

I = Pengeluaran Rumah Tangga Perusahaan Untuk Investasi

G = Pengeluaran Rumah Tangga Pemerintah

(X-M) = Ekspor Netto atau Perusahaan Rumah Luar Negeri

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

- A. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.
- B. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang

ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input langsung. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

### **2.1.3 Belanja Publik**

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 penganggaran belanja publik dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk merencanakan alokasi belanja dalam APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur. Khusus bagi Daerah Otonom Baru (DOB), Agar lebih memberikan perhatian pada belanja untuk kepentingan Masyarakat (pelayanan umum) dari pada belanja untuk membangun sarana perkantoran.
2. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/mempertimbangkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. **Belanja Pegawai**  
Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang benar-benar memiliki peranan dan Kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan.

4. Belanja Barang dan Jasa
- a) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran 2010. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
  - b) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
  - c) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
  - d) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
  - e) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat agar dilaksanakan di kantor kecuali dengan alasan tertentu dapat dilaksanakan di luar kantor.
  - f) Dalam rangka antisipasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan yang akan dikedaerahkan terhitung 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah makan Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengambil langkah-langkah dalam penyiapan dukungan program/kegiatan pengalihan (data, system, standar

pengelolaan, keterampilan, dsb) atas PBB perdesaan dan perkotaan dan BPHTB (berlaku efektif 1 Januari 2011) menjadi pajak daerah beserta sarana dan prasarana.

g) Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan dukungan program dan kegiatan terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud.

#### 5. Belanja Modal

a) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar dalam merencanakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi daerah.

b) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi Kondisi maupun umur ekonomisnya.

c) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

#### 2.1.4 Angkatan Kerja

Menurut Adioetomo (2010), Bahwa yang termasuk dalam angkatan kerja haruslah orang yang secara aktif bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan.

Berdasarkan konsep tersebut, angkatan kerja (labor force) dibagi menjadi dua yaitu:

1. Bekerja.
2. Mencari pekerjaan (menganggur), yang dapat dibedakan antara :
  - Mencari pekerjaan, tetapi sudah pernah bekerja sebelumnya dan
  - Mencari pekerjaan untuk pertama kalinya (belum pernah bekerja sebelumnya).

Angkatan kerja dapat dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam konsep angkatan kerja ini harus ada referensi waktu yang pasti, misalnya satu minggu sebelum pencacahan

Menurut Dumairy (1996), tenaga kerja (*manpower*) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja (*Labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni bukan orang-orang yang kegiatannya

bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat dependen).

Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan pengangguran. Yang dimaksud dengan pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Dalam Biro Pusat Statistik (BPS) pengertian bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontinue dalam seminggu yang lalu. Termasuk dalam batasan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Pengangguran semacam ini oleh BPS dinyatakan sebagai pengangguran terbuka.

Sedangkan angkatan kerja yang dikemukakan oleh Elfindri dan Nasri Bachtiar (2004) adalah:

$$AK = K + MP \dots\dots\dots(2.5)$$

Di mana:

- AK = angkatan kerja
- K = bekerja
- MP = mencari pekerjaan

Jumlah angkatan kerja di masa depan tidak hanya tergantung pada jumlah penduduk, tetapi juga dari proporsi penduduk yang sudah masuk usia kerja (angkatan kerja) dan tingkat partisipasi angkatan kerja di dalam pasar tenaga kerja itu sendiri tergantung pada sejumlah faktor dan karakteristik penduduk, seperti struktur umur dan jenis kelamin, lokasi tempat tinggal dan tempat kerja yang masih terbuka, status pendapatan, tingkat pendidikan atau keterampilan, serta kesempatan kerja dan mendapatkan pendapatan yang ada. Selain faktor tersebut, selera dan pilihan (*preference*) individu untuk bekerja atau tidak bekerja (*leisure*) serta faktor sosial dan kultur juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja dari angkatan kerja yang ada.

Tenaga kerja yang bukan angkatan kerja dibedakan menjadi tiga subkelompok yaitu penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan lain. Batasan BPS mengenai bersekolah adalah bersekolah formal dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, termasuk pelajar dan mahasiswa yang sedang berlibur.

### **2.1.5 Kebijakan Pemerintah**

Grindle (1980) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Akib dan Tarigan) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan

sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2)

adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. (Akib dan Tarigan, 2008)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

Menurut Sabatier (1986), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model

ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Meter dan Horn (1975) merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tertentu. Menurut Grindle (1980); implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan meliputi: kepentingan yang dipengaruhi tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Sabatier dan Mazmanian (1983); implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu; (1) karakteristik masalah; (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, dan (3) faktor-faktor di luar peraturan.

Setelah mengetahui kerangka pemikiran dari suatu studi implementasi, maka tugas evaluator berikutnya adalah mengetahui cara pengumpulan informasi/data melalui metode yang lazim yaitu: kuesioner, interview terbimbing maupun interview bebas dan mendalam dan analisis data sekunder (Djopari, 2008).

## **2.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen**

### **2.2.1 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan**

Di Indonesia selama dua dekade terakhir mengalami berbagai episode kontras terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan angka kemiskinan. Antara pertengahan 1980-an dan 1990-an, sebelum dilanda krisis ekonomi mulai 1997, Indonesia mengenyam pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penurunan angka kemiskinan yang cepat. Sebaliknya, selama krisis ekonomi 1997-1999, perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan tajam dan angka kemiskinan meningkat secara signifikan, dan merontokkan hasil pembanguana bertahun-tahun ( Dollar And Kraay, 2001).

Studi ekonomi umumnya menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan bertalian erat dengan pertumbuhan ekonomi. Secara prinsip, pertumbuhan ekonomi

merupakan persyaratan pertama dari pengentasan kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah menjamin bahwa pertumbuhan tersebut adalah proo-poor (Kraay, 2000)

Paradoks lain yang terjadi adalah keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki dampak terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Imam Cahyono (2005) dari lembaga riset Al-Maun Institute mengungkapkan selama ini klaim keberhasilan ekonomi pemerintah bersandar pada indikator makro-ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, kinerja pasar, modal yang cimerlang, dan konsolidasi fiskal yang mantap. Namun, prestasi itu tidak diikuti perbaikan indikator lain, seperti angka pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Handayani dan Nurdiana (2003) kajian empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tidak memberikan nilai dampak yang cukup berarti pada usaha pengentasan kemiskinan.

Pada analisis lainnya Rafikoh Rokhim dan Miranda Gultom (2007) menyatakan bahwa dari data yang diteliti, terlihat jelas bahwa sekalipun pertumbuhan ekonomi dilaporkan terus meningkat, tetapi angka kemiskinan tidak serta merta berkurang. Hasil kajian Bank Indonesia (BI) menyimpulkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan disebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih didorong sektor non-tradable, sektor inilah yang sedikit menyerap tenaga kerja

### **2.2.2 Pengaruh Belanja Publik terhadap Tingkat Kemiskinan**

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mereduksi kemiskinan. Jenis pengeluaran pemerintah yang diidentifikasi mempunyai

pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi, dan transfer (Filmer dan Pritchett, 1997 dalam Klasen, 2005).

Robert L. Curry, Jr., (2009) meneliti pada negara berkembang seperti beberapa negara di Afrika, dia menemukan bahwa belanja publik sangat berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Yani Mulyaningsih (2008) yang berjudul pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan menyatakan pengeluaran pemerintah di sektor publik juga tidak terbukti mempengaruhi kemiskinan, selain itu dalam model ke tiga pembangunan manusia berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil simulasi model ekonometrika peningkatan belanja publik juga berdampak positif terhadap peningkatan PDRB provinsi. Peningkatan PDRB yang terbesar terjadi di Provinsi Papua dan Kalimantan Barat. Dampak peningkatan belanja publik terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara ternyata tidak terlalu signifikan. Kenaikan PDRB berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya akan menurunkan jumlah pengangguran baik di perdesaan maupun perkotaan. Di samping itu, jumlah kemiskinan juga mengalami penurunan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Perlu penajaman pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal, dan belanja barang dan jasa terutama menyangkut pemilihan sektor dan wilayah. Dengan penajaman pengeluaran pemerintah tersebut diharapkan belanja modal, dan belanja

barang dan jasa memberi dampak positif terhadap perekonomian wilayah yang diukur dari peningkatan PDRB, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah. (Bappenas)

Menurut Gazi Mainul Hassan (2005), dalam analisisnya tentang bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Penelitiannya menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa semakin banyak pengeluaran pemerintah maka akan mengurangi kemiskinan.

### **2.2.3 Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan**

Menurut Lincoln Arsyad (1997), salah satu tujuan yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, lebih-lebih bagi negara berkembang, terutama Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks.

Selanjutnya Shinichi Ichimura (1989), masalah kemiskinan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari masalah tingginya beban tanggungan. Orang miskin di Indonesia memiliki anggota keluarga yang lebih banyak dan jumlahnya besar dalam angkatan kerja. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin sangat rendah, demikian juga halnya dengan anggota keluarganya. Anggota keluarga miskin sering berganti-ganti pekerjaan dan mereka yang telah bekerja sering memiliki pekerjaan-pekerjaan tambahan.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di daerah pedesaan biasanya tergolong tinggi. Keadaan ini mengakibatkan sebagian besar jumlah penduduk terdiri dari anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dan belum bisa bekerja, sehingga angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka sudah dapat dipastikan keluarga tersebut semakin terbelenggu oleh kemiskinaannya.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Vivi Eka Sari (2010) menemukan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang dilihat dari tanda positif pada koefisien regresi. Artinya setiap penambahan angkatan kerja akan menambah kemiskinan.

#### **2.2.4 Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan**

Salah satu persyaratan pokok dalam pengurangan tingkat kemiskinan di suatu daerah adalah komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah. Pada dasarnya pengentasan kemiskinan harus dientaskan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

Dalam mengatasi kesenjangan antar daerah serta dampak krisis ekonomi, pemerintah berusaha meningkatkan alokasi dana langsung ke daerah, meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, dan menggerakkan kembali kegiatan ekonomi di berbagai daerah secara merata. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan berjalan optimal jika tanpa pemberdayaan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya masyarakat kecil, ataupun tanpa didukung investasi swasta di daerah. Peningkatan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya masyarakat kecil, dilakukan melalui penyediaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di daerah ([www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/BHaug07011.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BHaug07011.pdf)).

Menurut Yopi.E.A (2009) dari hasil regresi logistik menunjukkan bahwa ternyata variabel kebijakan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap implementasi pengentasan kemiskinan berbasis mesjid di kenagarian bawan kecamatan ampek nagari Kabupaten Agam. Sedangkan variabel pembinaan, monitoring dan evaluasi tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi penanggulangan kemiskinan berbasis mesjid di kenagarian bawan kecamatan ampek nagari Kabupaten Agam. Menurut Sefry Donaldi (2009) dummy variabel kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam.

### 2.3 Tinjauan Literatur

Dalam tinjauan literatur ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, dan permasalahan yang diangkat juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, baik itu melalui pemelitan biasa ataupun skripsi. Yang mana mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi ini, seperti oleh beberapa penelitian yang terdahulu yang dijadikan kajian pustaka yaitu sebagai berikut :

Terlihat kondisi bahwa seberapa banyak orang miskin di dunia menerima manfaat dari pertumbuhan yang dipengaruhi oleh perdagangan bebas dan investasi asing . Banyak artikel ekonomi berpendangan bahwa pertumbuhan dapat mengurangi kemiskinan studi yang dilakukan Dollar dan Kray (2000) menemukan bahwa pendapatan rata-rata kuintil termiskin bergerak hampir satu-satu dari pendapatan rata-rata keseluruhan. Direktur Kebijakan Oxfam berpendapatan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan mencekik potensi masyarakat miskin, hal ini bertentangan dengan Dollar dan Kraay. (Ravallion,2001)

Penelitian yang dilakukan oleh Abena D. Oduro (2001), yang menganalisis tentang pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006), menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan,

kenaikan Share pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan tingkat pendidikan mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidik SMP lebih besar daripada pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy krisis mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan.

Belanja pemerintah memiliki efek positif yang kuat terhadap pengurangan kemiskinan dari hasil regresi. Peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar satu persen cenderung mengurangi 0,0188 persen jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di provinsi sebesar 1% di tingkat signifikansi, sementara variabel lain konstan. Hal ini berpengaruh kuat karena pengeluaran pemerintah berfokus terutama pada investasi dalam infrastruktur serta program pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara bersamaan (Hung, 2006).

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun magnitude pengaruh tersebut relatif tidak besar. Inflasi maupun populasi penduduk juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruh masing-masingnya relatif kecil. Peningkatan share sektor pertanian dan share sektor industri juga signifikan mengurangi jumlah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Syarat kecukupannya (*sufficient condition*). Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan PDRB sebesar Rp 1 triliun akan

mengurangi atau menurunkan jumlah orang miskin sekitar 9000 orang (Siregar, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasidin K. Sitepul dan Bonar M. Sinaga (2009), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa investasi sumber daya manusia untuk pendidikan dapat menurunkan *poverty incidence*, *poverty depth* dan *poverty severity* kecuali untuk rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa, bukan angkatan kerja di kota dan bukan pertanian golongan atas di kota.

Menurut Sefry Donaldi (2009) Dummy variabel kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam. Hal ini karena kebijakan atau dukungan pemerintah daerah merupakan suatu program pencapaian tujuan/nilai serta tindakan yang terarah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berwenang. Untuk dijadikan pedoman/petunjuk bagi setiap upaya atau kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2001 – 2010.

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Periode data yang digunakan adalah data tahun 2001 – 2010 di Kabupaten Sijunjung, data yang diperlukan adalah:

1. Data persentase penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung tahun 2001-2010.
2. Data Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Sijunjung tahun 2001-2010.
3. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya data anggaran belanja publik yang terealisasi di Kabupaten Sijunjung tahun 2001-2010.
4. Data angkatan kerja di Kabupaten Sijunjung tahun 2001-2010.
5. Data ada atau tidaknya Kebijakan pemerintah sijunjung dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung tahun 2001-2010.

### 3.2 Pembentukan Model

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan (Siregar, 2007). Selanjutnya menurut Sefry Donaldi (2009) Dummy variabel kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan angkatan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan (Vivi, 2010)

Sementara itu pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari model yang sudah di kembangkan oleh Gazi Mainul Hassan (2005) dan Abena D. Oduro (2001). Dimana penelitiannya menggambarkan model sebagai berikut:

$$P = f(\text{ZGDP, EMP, WAGES}) \dots\dots\dots(3.1)$$

Di mana:

P = Poverty

ZGDP = GDP growth

EMP = employment

Wages = wages

Pada model diatas, dapat dinyatakan P atau tingkat kemiskinan ditentukan oleh besar kecilnya pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja dan tingkat upah. Sementara itu dalam studi ini menggunakan analisis deret waktu (*time-serries data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 15 for windows. Selanjutnya menurut Gujarati (2003) persamaan model dengan *time-series* dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t; t = 1, 2, \dots, T \dots \dots \dots (3.2)$$

dimana T adalah banyaknya *data time-series*.

Berdasarkan model di atas mencoba mengaplikasikannya terhadap penelitian di Kabupaten Sijunjung. Dimana bentuk fungsi antara pengaruh PDRB, belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah yang akan digunakan untuk mengetahui kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka struktur model yang akan digunakan adalah model output keseimbangan (Mankiw, 2003), dapat dituliskan dengan persamaan:

$$KM = f(PDRB, BP, AK, KP) \dots \dots \dots (3.3)$$

$$KM = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + U \dots \dots \dots (3.4)$$

dimana:

KM = Persentase kemiskinan dalam persen.

X1 = Laju PDRB harga konstan 2000 dalam rupiah

X2 = Belanja Publik

X3 = Angkatan Kerja

X4 = Kebijakan Pemerintah

B0 = konstanta.

B1, B2, B3 = koefisien.

U = error

Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghozali, 2005) adalah sebagai berikut :

- a) Menghindari adanya heteroskedastisitas.
- b) Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas.
- c) Mendekatkan skala data

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk log - linear (*log*). Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

$$\text{Log KM} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log PDRB} + \beta_2 \text{Log BP} + \beta_3 \text{Log AK} + \beta_3 \text{KP} + U \dots\dots\dots (3.5)$$

Di mana:

$\text{log KM} = \text{log-Kemiskinan.}$

$\beta_1 - \beta_3 = \text{koefisien.}$

$U = \text{error.}$

### 3.3 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan *construct* atau konsep yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

#### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah persentase kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung tahun 2001-2010.

## 2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Publik (BP), Angkatan kerja (AK), dan Kebijakan Pemerintah (KP).

Langkah berikutnya setelah menspesifikasi variabel-variabel penelitian adalah melakukan pendefinisian secara operasional. Hal ini bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur.

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Kemiskinan (KM) (Y)

Kemiskinan Merupakan suatu gejala yang terjadi disekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan serta rendahnya Derajat Kesehatan Penduduk Miskin serta tidak di Dukung Oleh SDM, Sarana dan Prasaran yang Memadai di Kabupaten Sijunjung atau Kemiskinan berarti sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau orang tertentu dan perhitungan yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut digunakan sebagai standar perhitungan untuk menentukan jumlah kemiskinan yang ada di suatu daerah. Atau

singkatnya, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah persentase penduduk miskin tahun 2000 – 2010 (dalam satuan persen).

## 2. PDRB (PDRB) (X1)

Indikator *aggregate* ekonomi makro yang lazim digunakan untuk kondisi perekonomian suatu wilayah adalah PDB untuk nasional dan PDRB untuk daerah tingkat provinsi/kabupaten. PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB sehingga dengan demikian PDRB merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendapatan nasional. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Sadono Sukirno (2000). Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak, perhitungan PDRB akan ditimbulkan dari suatu daerah ada tiga pendekatan. PDRB yang dimaksud adalah laju PDRB atas dasar harga konstan (2000) tahun 2001 – 2010 (dalam rupiah).

### **3. Belanja Publik (X2)**

Belanja publik merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.(Made Suwandi, 2006). Data yang digunakan untuk melihat belanja publik adalah data orang yang di ambil dari DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan Asset Daerah) di Kabupaten Sijunjung tahun 2001 – 2010 (dalam rupiah).

### **4. Angkatan Kerja (X3)**

Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disampaikan oleh Wahyu Adji, Suwerli, Suratno (2005). Aktif ini tidak selalu berarti sudah bekerja yang digolongkan sebagian angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan (pengangguran). Batas usia ini diatur dalam UU No 20 tahun 1999 pasal 2 ayat 2. Sedangkan menurut versi Bank dunia adalah antara 15-64 tahun. Pengangguran berarti seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Data yang digunakan untuk melihat angkatan kerja adalah data orang yang bekerja di Kabupaten Sijunjung tahun 2001 – 2010 (dalam satuan jiwa).

### **5. Kebijakan Pemerintah (X4)**

Amar dalam Yopi E.A (2010) mendefinisikan Kebijakan Pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan mempunyai arti penting

dalam mempengaruhi sejumlah orang. Sedangkan Lasswel dan Kaplan dalam Yopi E.A (2010) mengatakan kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan yang terarah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap upaya atau kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

### **3.4 Metode Analisis dan Pengolahan Data**

#### **3.4.1 Analisa Deskriptif**

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini, dimana untuk menjelaskan semua variabel yang diteliti baik variabel terikat dan variabel bebas dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif, analisa secara deskriptif dilakukan dengan cara menginterpretasikan hasil olahan lewat tabulasi frekuensi guna menyingkap kecenderungan data nominal empiris dan deskripsi data, yang berguna untuk mengetahui keadaan interval berdasarkan hasil penelitian.

#### **3.4.2 Analisa Kuantitatif**

Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung, juga dilakukan secara kuantitatif dengan regresi berganda linear dengan SPSS 15 for windows. Dari regresi dihasilkan output statistik antara

lain koefisien korelasi ( $R$ ), koefisien determinasi ( $R^2$ ). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang bergantung pada variabel yang lain yang disebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variabel yang diketahui (Gujarati, 2003). Fungsi dari penelitian ini adalah, Jumlah penduduk miskin =  $f$  (Produk Domestik Regional Bruto, belanja publik, angkatan kerja, dan dummy variabel kebijakan penanggulangan kemiskinan)

### 3.5 Uji Statistik

Damodar Gujarati (1995) menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah  $H_0$  dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji  $t$ ), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji  $F$ ), dan pengujian koefisien determinasi (uji- $R^2$ ).

### 3.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

1. Untuk variabel PDRB

H0 :  $b_1 = 0$  tidak ada pengaruh antara variabel PDRB dengan kemiskinan.

H1 :  $b_1 \neq 0$  ada pengaruh negatif antara variabel PDRB dengan kemiskinan.

2. Untuk variabel APBD

H0 :  $b_2 = 0$  tidak ada pengaruh antara variabel APBD dengan kemiskinan.

H1 :  $b_2 \neq 0$  ada pengaruh negatif antara variabel APBD dengan kemiskinan.

3. Untuk variabel angkatan kerja

H0 :  $b_3 = 0$  tidak ada pengaruh antara variabel jumlah angkatan kerja dengan kemiskinan.

H1 :  $b_3 \neq 0$  ada pengaruh positif antara variabel angkatan kerja dengan kemiskinan.

4. Untuk variabel kebijakan pemerintah

H0 :  $b_3 = 0$  tidak ada pengaruh antara variabel jumlah kebijakan pemerintah dengan kemiskinan.

H1 :  $b_3 \neq 0$  ada pengaruh Positif antara variabel kebijakan pemerintah dengan kemiskinan.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:

$$t = \frac{Bi - Bi^*}{SE(Bi)} \dots\dots\dots (3.6)$$

dimana:

$\beta_i$  = parameter yang diestimasi.

$\beta_i^*$  = nilai hipotesis dari  $\beta_i$  ( $H_0 : \beta_i = \beta_i^*$ ).

$SE(\beta_i)$  = simpangan baku  $\beta_i$ .

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan:

1.  $H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$  semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama
2.  $H_1 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$  semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (N - 1)} \dots \dots \dots (3.7)$$

dimana:

$k$  = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

$N$  = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- a)  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
- b)  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

### 3.5.3 Uji Koefisien Determinasi (uji $R^2$ )

Imam Ghozali (2002) menyatakan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel

pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* ( $R^2$ ) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan formula:

$$R^2 = \frac{\sum y^{*2}}{\sum y^2} \dots \dots \dots (3.8)$$

dimana:

- $y^*$  = nilai  $y$  estimasi.
- $y$  = nilai  $y$  actual.



## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

#### 4.1.1 Kondisi Geografis

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuklah Kabupaten Tanah Datar dengan ibukotanya Sawahlunto pada bulan Oktober 1945, yang wilayahnya meliputi beberapa kewedanaan yaitu Batusangkar, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto dan Sawahlunto/Sijunjung. Dalam rangka melanjutkan perjuangan kemerdekaan, Gubernur Militer Sumatera Barat membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan pada tanggal 28 Februari 1949 (BPS, 2010).

Di era otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sijunjung kembali mengalami perubahan yang signifikan pula. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, pembangunan Kabupaten Sijunjung memasuki era baru. Wilayah administratif dan pembangunan Kabupaten Sijunjung secara resmi tidak lagi mencakup Kabupaten Dharmasraya. Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2008 pada tanggal 10 Maret 2008 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung diubah namanya menjadi Kabupaten Sijunjung (BPS, 2010).

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terletak diantara 0°18'43" LS – 1°41'46" LS dan 100°46'50" BT – 101°53'50" BT dengan batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Dharmasraya
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto
- Sebelah Timar : Kabupaten Kuantan Singingi (Prop Riau)

Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung dengan luas 313.080 Ha meliputi 8 Kecamatan, 54 Nagari dan 1 desa dengan 254 Jorong.

**Table 4.1**

**Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Sijunjung**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Luas
1	Kamang Baru	83.780	26,76
2	Tanjung Gadang	45.979	14,69
3	Sijunjung	74.800	23,89
4	Lubuk Tarok	18.760	5,99
5	IV Nagari	9.630	3,08
6	Kupitan	8.201	2,62
7	Koto VII	14.390	4,60
8	Sumpur Kudus	57.540	18,37
Jumlah		313.080	100,00

*Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010*

Kecamatan di Kabupaten Sijunjung yang terluas adalah Kecamatan Kamang Baru 83.780 Km (26,76%), dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kupitan 8.201

Km (2,62%). Untuk lebih jelasnya luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Sijunjung (BPS, 2010).

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan penurunan di berbagai bidang yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas terhadap kegiatan sosial-ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sehingga tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih baik. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan keadilan sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berkaitan erat dengan hal ini, maka penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat ditunda sehingga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prinsip keadilan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan dan merupakan komitmen nasional yang harus dilakukan secara sistematis antar lintas sektor, lintas pelaku, terpadu dan berkelanjutan. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diperlukan penajaman-penajaman sehingga efektivitas program dapat diwujudkan. Seperti memperbaiki kesenjangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena kemiskinan yang ada di dalam provinsi ini.

Kemudian kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial dan sektoral. Sebaliknya harus dilakukan secara sistemik, terencana dan terintegrasi.

Oleh karena itu pemerintah sangat berupaya keras untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut sehingga pembangunan dilakukan secara terus menerus termasuk dalam menentukan batas ukur untuk mengenali siapa si miskin tersebut. Berikut disajikan data tentang kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung tahun 2001-2010.

**Tabel 4.2**  
**Kemiskinan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2001 – 2010**

Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase Kemiskinan	Jumlah Angka kemiskinan	Pertumbuhan Kemiskinan (%)
2001	168 808	21,48%	67400	-
2002	172 874	21,04%	67307	-0,14
2003	176 702	28,41%	50200	-15,42
2004	180 131	25,81%	46500	-7,37
2005	183 626	28,11%	51.612	10,99
2006	187 189	25,37%	47.491	-7,98
2007	190 821	23,34%	44.543	-6,21
2008	194 524	21,94%	42.681	-4,18
2009	198 299	18,01%	35896	-15,90
2010	201.823	18,00%	36292	0,01
<b>Pertumbuhan Rata-rata</b>				<b>-6,123</b>

Sumber: - BPS, Penduduk Miskin Di Sumatera Barat  
- Sijunjung Dalam Angka

Pada tabel 4.2 dapat dilihat Jumlah angka kemiskinan dari tahun 2001-2004 selalu mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2005 jumlah angka kemiskinan naik menjadi 51.612 dari 46.500 pada tahun 2004, hal ini mungkin disebabkan oleh usaha pemerintah daerah yang terus berusaha untuk meningkatkan dan memajukan daerah, sehingga jumlah penduduk yang menghuni wilayah Kabupaten Sijunjung semakin meningkat. Seiring dengan hal positif diatas jumlah keluarga miskin pun mengalami penurunan yaitu yang awalnya pada tahun 2006 berjumlah 51.612 turun menjadi 47.491. Hal ini mungkin dikarenakan oleh berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terus diusahakan oleh pemerintah sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Pada tahun-tahun selanjutnya juga terjadi hal yang serupa yaitu terjadi penurunan yang signifikan. Jumlah angka kemiskinan miskin yang sejak tahun 2005-2009 mengalami penurunan, pada tahun 2009 dan 2010 terjadi kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Padahal ditahun inilah program pengentasan kemiskinan tengah gencar dilakukan oleh pemerintah daerah, meskipun terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dari angka 35.896 menjadi 36.292 namun persentase rasionya tidak terlalu mengalami penurunan yang berarti. Hal ini mungkin disebabkan oleh belum maksimalnya peranan program penanggulangan kemiskinan yang berjalan di masyarakat dan mungkin juga karena hasil yang diharapkan pemerintah belum terlihat kenaikannya secara signifikan karena masih dalam proses atau juga dikarenakan oleh kebijakan strategis yang telah dirancang pemerintah Kabupaten Sijunjung belum tepat sasaran. Kemiskinan tidak hanya karena alasan ekonomi, namun dapat juga disebabkan oleh alasan non-ekonomi yang

dilatarbelakangi oleh beberapa hal misalnya budaya malas, kurangnya dorongan dari orang tua, kurang mampu berorganisasi dan lain-lainnya.

#### **4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan Pendekatan Statistik PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah dan waktu tertentu.

Menurut Kuznet dalam Tulus Tambunan (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut Hermanto S. dan Dwi W. (2006) mengungkapkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat maka kemiskinan di suatu daerah dapat ditekan jumlahnya. Yang mana kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Namun dalam penelitian penelitian Ravi Dwi wijayanto (2010), peningkatan laju PDRB tidak selalu di ikuti dengan penurunan kemiskinan. Berikut disajikan data PDRB di Kabupaten Sijunjung tahun 2001-2010.

**Tabel 4.3**  
**PDRB Berdasarkan Harga Konstan**  
**2000 di Kabupaten Sijunjung Tahun 2001 – 2010**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Atas Dalam Harga Konstan (2000)</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (Persen)</b>
2001	839,043,17	-
2002	877,999,39	4,64
2003	919,081,38	4,68
2004	971,540,46	5,71
2005	1,023,241,24	5,32
2006	1,084,134,39	5,95
2007	1,145,007,18	5,61
2008	1,205,702,95	5,28
2009	1,271,638,27	5,49
2010	1,343,278,00	5,63
Pertumbuhan Rata-rata		5,38

*Sumber: Sijunjung dalam Tahun 2001-2010*

Table 4.3 diatas menunjukkan bahwa perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga konstan di Kabupaten Sijunjung selama periode 2001-2005 menunjukkan pertumbuhan yang cenderung meningkat, tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi 6,47% dan tahun 2005 meningkat 6,54%. Ini berarti nilai tambah bruto produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di Kabupaten Sijunjung terus meningkat. Namun peningkatan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sijunjung tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan. Seperti halnya pertumbuhan PDRB di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 serta 2009 sampai dengan 2010 malah terjadi kenaikan kemiskinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Hal

ini mungkin disebabkan oleh usaha pemerintah daerah yang terus berusaha untuk meningkatkan dan memajukan daerah dan juga mungkin di karenakan di Kabupaten Sijunjung ini masih daerah pemekaran yang baru berkembang, yang menyebabkan masih ada ketimpangan pendapatan antar daerah di Kabupaten Sijunjung yang mengakibatkan kemiskinan masih meningkat, dan setelah tahap pembangunan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung akan menurun.

#### 4.2.3 Belanja Publik (BP)

Belanja publik terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut disajikan data belanja publik di Kabupaten Sijunjung tahun 2001-2010.

**Tabel 4.4**  
**Belanja Publik Atau Belanja Langsung**  
**di Kabupaten Sijunjung Tahun 2001 – 2010**

Tahun	Belanja Langsung	Pertumbuhan (%)
2001	84.297.921,36	-
2002	99.082.508,40	17,54
2003	94.868.973,22	-4,25
2004	75.761.877,49	-20,14
2005	68.685.904,07	-9,34
2006	111.665.345,45	62,57
2007	145.656.117,64	30,44
2008	17.8091.290,61	22,27
2009	184.880.468,33	3,81
2010	216.279.836,14	16,98
<b>Pertumbuhan Rata-rata</b>		<b>13,32</b>

Sumber: DPKAD Sijunjung Tahun 2001-2010

Pada Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2003 sampai dengan 2005 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh dana pengeluaran pemerintah Kabupaten Sijunjung digunakan untuk belanja pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, agar pegawai negeri dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu pada tahun 2006 sampai dengan 2010 realisasi belanja publik mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten sijunjung meningkatkan realisasi belanja publik guna memajukan pembangunan daerah dan berbagai program penunjang lainnya yang diantaranya terdapat program pengentasan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah yaitu belanja publik dan belanja tidak langsung merupakan salah satu instrumen penting untuk mereduksi kemiskinan. Jenis pengeluaran pemerintah yang diidentifikasi mempunyai pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi, dan transfer (Filmer dan Pritchett, 1997 dalam Klasen, 2005). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juga membedakan belanja daerah menjadi belanja publik dan belanja tidak langsung. Belanja publik merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.(Made Suwandi, 2006).

### 4.2.3 Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Mereka yang bekerja penuh adalah angkatan kerja yang aktif menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi.
2. Pengangguran terbuka atau *open unemployment* adalah mereka yang sama sekali tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan (sewaktu-waktu siap bekerja)
3. Setengah menganggur atau *under unemployment* adalah mereka yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan/keahliannya atau tidak menggunakan sepenuhnya tenaganya karena kekurangan lapangan perkerjaan. Contoh : Seorang sarjana bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya.
4. Pengangguran tersembunyi/tersamar atau disebut *disguise employment*, artinya suatu pekerjaan dikerjakan oleh pekerja yang berlebihan sehingga mereka tidak bekerja maksimal. (<http://id.wikipedia.org/wiki>)

Berikut disajikan data jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sijunjung tahun 2001-2010.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Angkatan Kerja di Kabupten Sijunjung**  
**Tahun 2001-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>Pertumbuhan Angkatan Kerja (%)</b>
2001	87.858	-
2002	92.328	4,84
2003	92.481	0,16
2004	98.527	6,13
2005	99.491	0,96
2006	82.726	-20,26
2007	83.791	1,27
2008	82.990	-0,96
2009	89.846	7,63
2010	88.725	-1,26
<b>Pertumbuhan Rata-rata</b>		<b>0,16</b>

*Sumber: Sijunjung Dalam Angka Tahun 2001-2010*

Tabel 4.5 menunjukkan jumlah angkatan kerja dari tahun 2001 sampai dengan 2010 selalu naik turun, misalnya pada tahun 2001 sampai dengan 2005 jumlah angkatan kerja selalu meningkat hal ini disebabkan banyaknya angka kelahiran daripada angka kematian serta diikuti oleh penambahan umur penduduk memasuki umur produktif yaitu 15 tahun sehingga menambah jumlah angkatan kerja. Namun bila dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja menurun sebesar 16.765 orang. hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah angkatan kerja yang sudah lanjut usia sehingga tidak termasuk lagi angkatan kerja dan angka kematian yang tinggi serta efek dari pemekaran daerah yang terjadi pada tahun

sebelumnya sehingga menyebabkan jumlah angkatan kerja menurun. Demikian juga pada tahun 2007 sampai dengan 2010 dimana jumlah angkatan kerja berfluktuasi.

Peningkatan tenaga kerja terlihat dari terserapnya mereka ke sektor-sektor yang secara tradisional banyak menampung tenaga kerja seperti perdagangan, pertanian dan industri. Sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Sijunjung, pada tahun 2001 sampai dengan 2010 masih didominasi oleh sektor Pertanian.

Menurut Lincoln Arsyad (1997), pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks.

#### **4.2.4 Kebijakan Pemerintah**

Masalah kemiskinan, kelaparan dan keterbelakangan yang selama ini hidup dibawah kemerlapan dunia hingga menimbulkan perbedaan yang tajam antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya.

Untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut pemerintah telah mempersiapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2007 didukung oleh beberapa program prioritas lain, antara lain:

1. Memberdayakan kelompok miskin yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi, serta perbaikan kemampuan dalam penguasaan IPTEK.
2. Menerapkan kebijakan ekonomi moral yaitu pengembangan sistem ekonomi moral sangat diperlukan sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus adil, sehingga dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila bukan pada ekonomi modern yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.
3. Melakukan pemetaan kemiskinan yaitu langkah awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu mengenali karakteristik dari penduduk yang miskin sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami.
4. Melakukan program pembangunan wilayah seperti Inpres dan transmigrasi serta memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan pedesaan seperti BKD dan KCK – KUD.

Semua program diatas dilaksanakan dengan suatu sistem Nasional, dimulai dari aspek perencanaan, operasional dan pengendalian menggunakan sistem nasional bahkan evaluasi juga dilakukan secara nasional.

Walaupun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, namun permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung masih belum berakhir dan hanya dapat memecahkan persoalan kemiskinan dalam jangka pendek. Disamping itu target group sebagai sasaran program sering tidak pada sasaran yang semestinya menerima, sekaligus pemanfaatan dari bentuk pelayanan itu sendiri (Achmadi, 2004). Sementara sistem penanggulangan kemiskinan secara dimanis; berupa pengembangan usaha produktif serta bentuk dukungan kelembagaan dan pendampingan, diduga juga sering belum optimal, baik manfaat maupun outcomes dari kegiatannya (ADB, 2004, Lindenthal, 2004, P2-LIPI, 2004). Sementara setiap tahunnya program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dan sangat sulit sampai kepada sebuah kesimpulan pengurangan kemiskinan sebagai kensekuensi dari kebijakan yang telah dilakukan (Elfindri, Mahdi & Wiko Saputra, 2005)

Dalam jangka pendek, prioritas penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat miskin akan jebakan kemiskinan "*Poverty trap*" yang dapat bergeser bila kehidupan makro ekonomi dalam keadaan labil sehingga sedikit saja terjadi gejolak ekonomi makro akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat miskin (Elfindri, Mahdi & Wiko Saputra, 2005)

Masalah kemiskinan ini mungkin saja disebabkan oleh permasalahan ekonomi (pendapatan masyarakat yang masih rendah) sehingga berdampak terhadap berbagai segi kehidupan. Selain itu rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dan gizi balita, kurangnya akses sektor informal dan rumah tangga terhadap perbankan dan sumber dana, tingginya angkatan kerja yang belum bekerja, masih adanya perkampungan

yang jauh dari akses perhubungan dan berfungsinya fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial terhadap pertumbuhan merupakan suatu hal yang harus dapat diatasi.

Di samping itu juga belum dimanfaatkannya fungsi-fungsi pelayanan sosial dan ekonomi untuk menggerakkan potensi masyarakat sehingga masyarakat juga tidak melihat pentingnya keberadaan fungsi-fungsi pelayanan sosial tersebut dalam lingkungannya.



## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Analisis Regresi

##### 5.1.1 Interpretasi Hasil Penelitian

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel independent PDRB (X1), Belanja Publik (BP) (X2), Angkatan kerja (X3), dan Kebijakan Pemerintah (X4) terhadap Kemiskinan (Y). Dari hasil regresi data-data yang ada di lampiran hasil analisis regresi diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1**

**Hasil pengujian dengan menggunakan persamaan regresi berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,938	1,698		6,441	,001		
	PDRB	-,802	,293	-,783	-2,734	,041	,121	8,275
	BP	-,225	,087	-,553	-2,586	,049	,217	4,612
	AK	,591	,118	,912	2,002	,004	,299	3,340
	KP							
		,026	,029	,117	,904	,408	,596	1,677

a Dependent Variable: Kemiskinan

Hasil analisis regresi linier sederhana di atas, dapat disusun dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Log KM} = 10,938 - 0,802 \text{ Log X1} - 0,225 \text{ Log X2} + 0,591 \text{ Log X3} + 0,03 \text{ X4}$$

T-test	(-2,75)	(-2,59)	(2,00)	(0,90)
--------	---------	---------	--------	--------

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi PDRB (X1) sebesar -0,80 menunjukkan besarnya pengaruh PDRB terhadap penurunan kemiskinan (Y), dimana PDRB berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan yang dilihat dari tanda negatif koefisien regresinya. Artinya setiap peningkatan 1 persen PDRB akan menurunkan 0,80 persen jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.
2. Koefisien regresi belanja publik (X2) adalah -0,23 menunjukkan besarnya pengaruh PDRB terhadap penurunan kemiskinan (Y), dimana belanja publik berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan yang dilihat dari tanda negatif koefisien regresinya. Artinya setiap penambahan 1 persen belanja publik akan menurunkan 0,23 persen jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.
3. Koefisien regresi angkatan kerja (X3) sebesar 0,59 menunjukkan besarnya pengaruh angkatan kerja terhadap penurunan kemiskinan (Y), dimana angkatan kerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang dilihat dari tanda positif koefisien regresinya. Artinya setiap penambahan 1 persen angkatan kerja akan menambah 0,59 persen jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.
4. Koefisien regresi kebijakan pemerintah (X4) menunjukkan dimana kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang dilihat dari tanda positif koefisien regresinya.

### 5.1.2 Uji Signifikansi parameter Individual (Uji t)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individu dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , dan begitu juga sebaliknya, masing-masing variabel independen secara individu tidak mempengaruhi variabel dependen jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ .

Dalam regresi pengaruh PDRB, Belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung tahun 2001 - 2010, dengan  $\alpha = 0,05$  dan *degree of freedom* (df) = 5 ( $n-k = 10-5$ ), maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,01.

#### 5.1.2.1 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Untuk variabel PDRB nilai perhitungan t-testnya adalah sebesar -2,74, ini menunjukkan nilai  $t\text{-test} > t\text{-tabel}$  ( $2,74 > 2,01$ ) dan signifikan pada derajat kepercayaan 95%. Karena  $t\text{-test} > t\text{-tabel}$  maka hasil perhitungan menunjukkan hubungan yang negatif yang artinya  $H_0$  dapat ditolak. Artinya terjadi peningkatan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Sijunjung yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga menyebabkan pertumbuhan PDRB yang positif. Pertumbuhan PDRB yang positif memperlihatkan pertumbuhan pendapatan per kapita dari setiap daerah tersebut positif dan nantinya

akan menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan distribusi pendapatan dari masing-masing rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2007) dimana pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun magnitudo pengaruh tersebut relatif tidak besar. Pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan.

#### **5.1.2.2 Pengaruh Belanja Publik terhadap Tingkat Kemiskinan**

Untuk variabel belanja publik nilai perhitungan t-testnya adalah sebesar -2,59 ini berarti nilai t-test > t-tabel ( $2,59 > 2,01$ ) dan signifikan pada derajat kepercayaan 95%. Karena t-test > t-tabel maka hasil perhitungan menunjukkan hubungan negatif yang artinya menolak  $H_0$ . Hal tersebut disebabkan, bahwa belanja publik di Kabupaten Sijunjung telah disebarkan keseluruh lapisan masyarakat, diantaranya menyediakan layanan bagi publik, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, sehingga tingkat kemiskinan berkurang.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hung (2006) dimana belanja pemerintah khususnya belanja publik memiliki efek positif yang kuat terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini berpengaruh kuat karena pengeluaran pemerintah berfokus terutama pada investasi dalam infrastruktur serta program pengentasan kemiskinan. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara bersamaan.

### **5.1.2.3 Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan**

Untuk variabel angkatan kerja nilai perhitungan t-testnya adalah sebesar 2,00 ini berarti nilai t-hitung < t-tabel ( $2,00 < 2,01$ ) yang artinya menerima  $H_0$ . Hal tersebut disebabkan karena di Kabupaten Sijunjung ketersediaan lapangan kerja tidak sesuai dengan angkatan kerja yang ada sehingga menyebabkan pengangguran bertambah dan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung meningkat. Dimana sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Sijunjung, pada tahun 2001 sampai dengan 2010 masih didominasi oleh sektor Pertanian

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Vivi Eka Sari (2010), dimana ketersediaan lapangan kerja tidak sesuai dengan angkatan kerja yang ada, yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat meningkat.

### **5.1.2.4 Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan.**

Untuk variabel kebijakan pemerintah nilai perhitungan t-testnya adalah sebesar 0,90 ini berarti nilai t-test < t-tabel ( $0,90 < 2,01$ ). Karena t-test < t-tabel maka hasil perhitungan menunjukkan hubungan positif yang artinya menerima  $H_0$ . Hal tersebut disebabkan, bahwa kebijakan di Kabupaten Sijunjung tidak di sebarakan secara keseluruhan lapisan masyarakat, atau dengan kata lain kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan belum tepat sasaran sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan masih meningkat. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang

dilakukan oleh Sefry Donaldi (2009) dimana variabel kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam

### 5.1.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari hasil penelitian didapatkan nilai F-test sebesar 23,96 sedangkan F-tabel dihitung dengan *degree of freedom for numerator* (dfn) = 4 ( $k-1 = 5-1$ ) dan *degree of freedom for denominator* (dfd) = 5 ( $n-k = 10-5$ ), dimana k adalah jumlah variabel dependen dan independen, sedangkan n adalah jumlah data, sehingga didapatkan nilai F tabel  $(4,5)$  sebesar 5,19. Hal ini menunjukkan nilai F-test > F-tabel, dan bisa dinyatakan bahwa secara bersama-sama (keseluruhan) PDRB, belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Sijunjung tahun 2001 - 2010.

### 5.1.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen.

Dari hasil regresi pengaruh PDRB, Belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung tahun 2001 - 2010 pada Tabel 5.2 diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,950. Hal ini berarti sebesar 95 persen variasi kemiskinan di Kabupaten Sijunjung dapat dijelaskan oleh variasi empat variable independennya yakni PDRB, Belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 5 persen dijelaskan oleh variable lain di luar model. Data yang di lampirkan hasil analisis regresi diperoleh hasil dapat dilihat Tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2**  
**Koefisien korelasi PDRB, Belanja Publik, Angkatan Kerja dan**  
**Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sijunjung**  
**Tahun 2001-2010**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,975 <sup>a</sup>	,950	,911	,02130	,950	23,956	4	5	,002

a.Predictors: (Constant), KP, BP, AK, PDRB

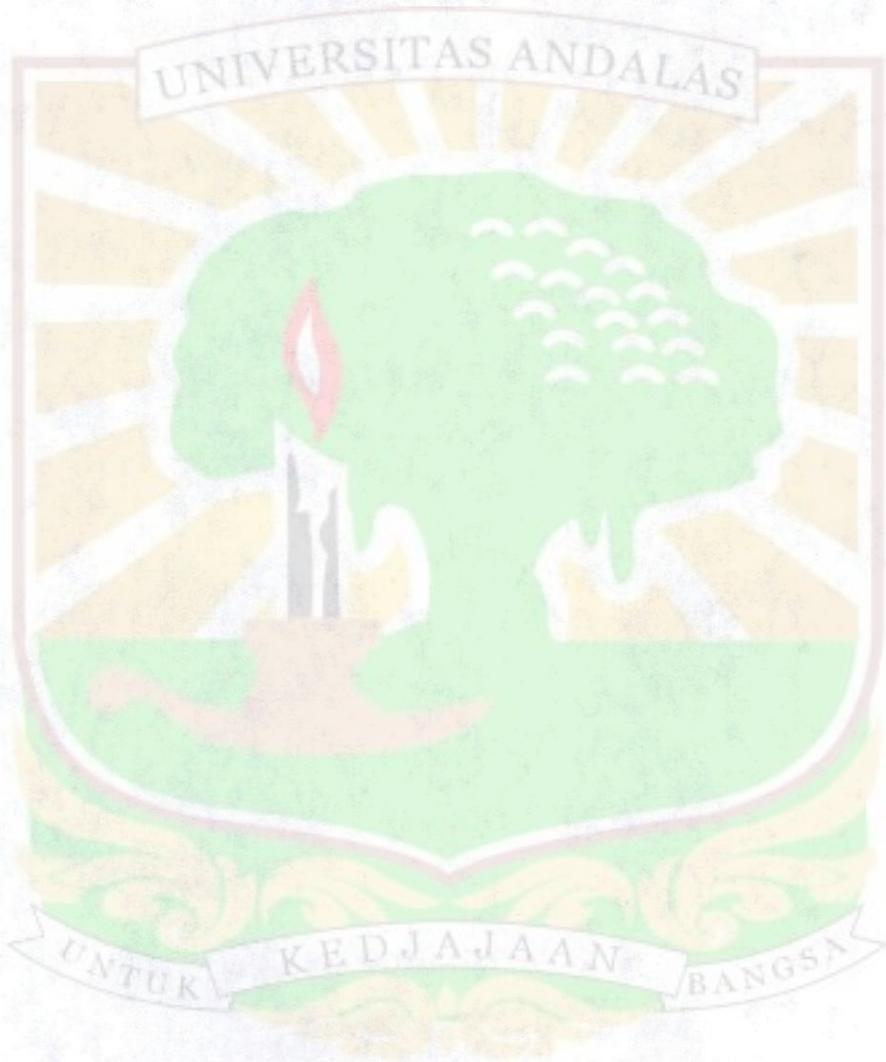
b.Dependent Variable: Kemiskinan

**5.2 Implikasi kebijakan**

Setelah dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Sijunjung, implikasi kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah yang bersangkutan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah:

- 1) Belanja publik mempunyai hubungan negatif dengan kemiskinan yang artinya perlu penajaman pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal, dan belanja barang dan jasa yang dapat mendukung sektor-sektor ekonomi yang potensial. dengan demikian diharapkan sektor ekonomi potensial tersebut akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini diharapkan nantinya akan dapat membuka lapangan kerja yang lebih banyak pada masa yang akan datang, sehingga juga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.
- 2) Terjadinya peningkatan angkatan kerja adalah sebagai akibat tingginya angka kelahiran. Karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung perlu mengontrol angka kelahiran melalui intensifikasi program KB.
- 3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sijunjung, maka kebijakan pemerintah merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud dan tujuan tersebut. Seperti dalam hal pengalokasian dana dan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung. Kebijakan tersebut harus didukung dengan evaluasi oleh pemerintah dan implementasi oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga tepat sasaran. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat

sejauh mana hasil implementasi kebijakan yang dijalankan dan hasil kualitas pelayanan.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel PDRB, belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung tahun 2001 - 2010. Berdasar hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) PDRB, belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa besarnya nilai  $R^2$  cukup tinggi yaitu 0,95. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 95 persen variasi variabel dependen kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik oleh keempat variabel independen yakni PDRB, belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah. Sedangkan 5 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.
2. Variabel PDRB ( $X_1$ ) sebesar -0,80 menunjukkan besarnya pengaruh PDRB terhadap kemiskinan ( $Y$ ). Dimana PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang dilihat dari tanda negatif koefisien regresinya. Artinya setiap peningkatan 1 persen PDRB akan mengurangi 0,80 persen kemiskinan.
3. Variabel Belanja Publik (BP) atau ( $X_2$ ) adalah -0,22. Dimana belanja publik berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang dilihat dari tanda negatif

koefisien regresinya. Artinya setiap penambahan 1 persen belanja publik akan mengurangi 0,22 persen kemiskinan.

4. Koefisien regresi angkatan kerja ( $X_3$ ) sebesar 0,59 menunjukkan besarnya pengaruh angkatan kerja terhadap kemiskinan ( $Y$ ). Dimana angkatan kerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang dilihat dari tanda positif koefisien regresinya. Artinya setiap penambahan 1 persen angkatan kerja akan menurunkan kemiskinan 0,59 persen dari jumlah angka kemiskinan.
5. Berdasarkan perhitungan dengan uji F diketahui bahwa  $F$ -hitung sebesar  $(25,03) > F$ -tabel  $(5,19)$ , sehingga inferensi yang diambil adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan kata lain, hipotesis yang berbunyi “Ada pengaruh antara variabel PDRB, belanja publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah secara simultan terhadap kemiskinan”, diterima pada tingkat kepercayaan 95%.

## 6.2 Keterbatasan

Kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah analisis dan interpretasi dalam penelitian ini adalah data time series yang di gunakan masih terlalu pendek. Sehingga mempengaruhi hasil signifikansi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Hal ini perlu dilakukan penelitian kembali dalam permasalahan yang sama.

### 6.3 Saran

1. PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, sehingga diharapkan pemerintah Kabupaten Sijunjung meningkatkan total produksi barang dan jasa (PDRB) dengan memberi peran masyarakat sebagai aktor utama atau subyek pembangunan sedangkan pemerintah sebagai fasilitator.
2. Pemerintah perlu mengalokasikan Belanja publik terhadap sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menampung tenaga kerja yang masih miskin.
3. Angkatan kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan, diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sijunjung dan swasta supaya menambah lapangan kerja terutama yang padat karya sehingga mengurangi kemiskinan di Sijunjung.
4. Kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung sebaiknya lebih ditingkatkan pada sektor riil, seperti pemberian modal usaha kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomiannya. Serta diperlukannya monitoring dan evaluasi dari kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut.
5. Disarankan kepada penelitian berikutnya agar mengetahui variabel lain yang paling berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung selain PDRB, belanja Publik, angkatan kerja dan kebijakan pemerintah yang nantinya berguna untuk menentukan kebijakan apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank Report. 2004. *Fighting Poverty in Asia and Pacific : The Poverty Reduction Strategy*.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih & Omas Bulan Samosir (ed). 2010. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Agussalim. 2005. *Sanggupkah Pengeluaran Pemerintah Mereduksi Kemiskinan*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Hasanudin
- Akib, Haeder & Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Bappenas Jakarta.
- Amijaya, Deny, Tisna. 2008. *Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan*. [Http://www.scribd.com/doc/54230297/2/pengaruh-pengangguran-terhadap-tingkat-kemiskinan](http://www.scribd.com/doc/54230297/2/pengaruh-pengangguran-terhadap-tingkat-kemiskinan)
- Anroni, Yopi, Eka. 2010. *Evaluasi Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid Studi Kasus : Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam*. Padang : Kumpulan Skripsi Universitas Andalas.
- Amartya, Sen, 1994. *in equality reexamined*. Cambridge : Harvard university press.
- Badan Pusat Statistik. 2000-2010. *Statistik Indonesia dalam sensus nasional*. BPS Indonesia.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi pertama*. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi. Yogyakarta : Penerbit BPF.
- Bland, Robert & Samuel Nunn. 1992. *The impact of capital spending on municipal operating budgets*. Public Budgeting & Finance (Summer):
- Curry, Jr. Robert L. 2009. *Public Expenditures, Growth, and Poverty: Lessons from Developing Countries*. Sacramento : California State University.
- Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di Kabupaten Sijunjung tahun 2003-2009, Sijunjung: DPKAD.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1980. *Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini Dan Masa Mendatang*. Jakarta : LP3ES.

- Dollar, David, and Kraay, Aart. 2001. *Trade, Growth, And Poverty*. World Bank Policy research working paper no.2615.
- Dorbush, R. S. Fisher dan R. Startz, 2004, *Macroeconomics*, 9<sup>th</sup> ed, McGrawhill, Boston
- Donaldi, Sefry. (2009). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Agam*. Padang : Kumpulan Skripsi Universitas Andalas.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Edward III, George C (edited). 1984. *Public Policy Implementing*. London-England : Jai Press Inc.
- Elfindri and Nasri, Bachtiar. 2004. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Padang : Universitas Andalas.
- Eka, Sari, Vivi. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, APBD Dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pasaman Barat*. Padang : Kumpulan Skripsi Universitas Andalas.
- Esmara, Hendra. 1986. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia.
- Hung, Trang, Trong. 2006. *Impacts of Foreign Direct Investment on Poverty Reduction in Vietnam*.  
[Http://www.grips.ac.jp/vietnam/VDFTokyo/Doc/18TT\\_HungPaper](http://www.grips.ac.jp/vietnam/VDFTokyo/Doc/18TT_HungPaper).
- Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Hasanudin.
- Grindle, Merilee, S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometri Dasar Terjemahan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics Fourth Edition*. New York.: Penerbit United States Military Academy.
- Ichimura, Shinichi. 1989. *Pembangunan ekonomi Indonesia*. Jakarta : UI-Press;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri no 29 Tahun 2002 tentang *Belanja Modal*. Jakarta.

- Klasen, Stephan. 2005. *"Economic Growth and Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues,"* OECD Development Centre Working Papers 246, OECD Publishing.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan.* Edisi Ketiga. Yogyakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Lains, Alfian. 1980. *Analisa Garis Kemiskinan dan Penentuan Kecamatan Miskin di Sumatera Barat,* Jakarta,
- Lincoln, Arsyad. 1997. *Ekonomi Pembangunan.* Edisi ke-3, STIE YKPN.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi.* edisi ke Empat. Harvard University : Erlangga.
- Mazmanian, Daniel, A and Paul, A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy.* USA : Scott Foresman and Company.
- Mulyaningsih, Yani. 2008. *Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan.* Jakarta : Kumpulan Tesis Universitas Indonesia.
- Handayani, S dan F. Nurdiana. 2003. *Aspek Kependudukan versus Ketahanan Pangan.* Jakarta : Media Indonesia, 16 Oktober 2003.
- Meter, Donald S. Van and Carl E. Van Horn. 1975. *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework"*. in Administration and Society, Beverly Hills: Sage Publication.
- Oduro, Abena, D. 2001. *A Note On Public Expenditure And Poverty Reduction In Ghan.,* Organised by ISSER and CEPA, in Collaboration with Cornell University.
- Octaviani, Dian. 2001. *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia :Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke.* Media Ekonomi, Hal. 100-118, Vol. 7, No. 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- Putra, I, Dewa, Gede, Agung, Diasana. 2007. *Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan.* Bali : FE-UU.
- Ravallion, Martin, 2001. *"Growth, inequality, and poverty : looking beyond averages,"* Policy Research Working Paper Series 2558, The World Bank.

- Salim, Emil. 1982. *Pendapatan Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan*. Jakarta : Yayasan Indayu.
- Sitepu, Rasyidin, K. dan Bonar M. Sinaga. 2004. *Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium*. Bogor : FE-IPB,
- Siregar, Herman. 2007. *Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin*. IPB & Brighten Institute
- Soetomo. 2003. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sritua, Arif. 1983. *Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Suripto, Agus, Suryo. 2005. *Kebijakan Pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah*. Surakarta : Kumpulan Tesis Universitas Muhammadiyah.
- Syahdan. 2004. *Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Tambunan, Tulus. 2001, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta. : Teori dan Temuan Empiris. Penerbit PT. Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Edisi Revisi. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Dunia Ketiga*. Edisi ketujuh .Jilid III. Jakarta: Erlangga.
- The Economic May. 2007. **“Making Better Services for the Poor”**. World Development Report 2004 : Oxford University Press.
- Wijayanto, Ravi, Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. Semarang : Kumpulan Skripsi UNDIP.

Yakub, Yuzirwan. 2004. *Karakteristik Rumah Tangga Miskin Di Kota Padang Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi Tahun 1998*. Padang : Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.

[www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/BHaug0701I.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BHaug0701I.pdf)



# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### DATA VARIABLE PENELITIAN

	PDRB	BP	AK	KP	LOG KM	LOG PDRB	BP	LOG AK
8	839043,17	84297921,36	87858	0	1,332034277	5,923784	7,925817	4,94378131
4	877999,39	99082508,4	92328	0	1,323045735	5,943494	7,995997	4,96533343
1	919081,38	94868973,22	92481	1	1,453471234	5,963354	7,977124	4,96605252
1	971540,46	75761877,49	98527	1	1,411788005	5,987461	7,879451	4,99355526
1	1023241,24	68685904,07	99491	1	1,448860846	6,009978	7,836868	4,9977838
7	1084134,39	111665345,5	82726	1	1,404320467	6,035083	8,047918	4,91764203
4	1145007,18	145656117,6	83791	1	1,368100852	6,058808	8,163329	4,92319737
4	1205702,95	178091290,6	82990	1	1,341236623	6,08124	8,250643	4,91902576
1	1271638,27	184880468,3	89846	1	1,255513713	6,104364	8,266891	4,95349875
	1343278	216279836,1	88725	1	1,255272505	6,128166	8,335016	4,94804601



**Lampiran 2**  
**ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Kemiskinan	1,3594	,07128	10
PDRB	6,0236	,06964	10
BP	8,0679	,17523	10
AK	5,0027	,10995	10
KP	,9000	,31623	10

**Correlations**

		Kemiskinan	PDRB	BP	AK	KP
Pearson Correlation	Kemiskinan	1,000	-,507	-,751	-,134	,135
	PDRB	-,507	1,000	,847	-,752	,503
	BP	-,751	,847	1,000	-,474	,285
	AK	-,134	-,752	-,474	1,000	-,625
	KP	,135	,503	,285	-,625	1,000
Sig. (1-tailed)	Kemiskinan	.	,067	,006	,356	,355
	PDRB	,067	.	,001	,006	,069
	BP	,006	,001	.	,083	,212
	AK	,356	,006	,083	.	,027
	KP	,355	,069	,212	,027	.
N	Kemiskinan	10	10	10	10	10
	PDRB	10	10	10	10	10
	BP	10	10	10	10	10
	AK	10	10	10	10	10
	KP	10	10	10	10	10

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KP, BP, AK, PDRB <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kemiskinan

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,975 <sup>a</sup>	,950	,911	,02130	2,072

a. Predictors: (Constant), KP, BP, AK, PDRB

b. Dependent Variable: Kemiskinan

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,043	4	,011	23,956	,002 <sup>a</sup>
	Residual	,002	5	,000		
	Total	,046	9			

a. Predictors: (Constant), KP, BP, AK, PDRB

b. Dependent Variable: Kemiskinan

**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	10,938	1,698		6,441	,001		
	PDRB	-,802	,293	-,783	-2,734	,041	,121	8,275
	BP	-,225	,087	-,553	-2,586	,049	,217	4,612
	AK	,591	,118	,912	2,002	,004	,299	3,340
	KP	,026	,029	,117	,904	,408	,596	1,677

a. Dependent Variable: Kemiskinan

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model		KP	BP	AK	PDRB	
1	Correlations	KP	1,000	,133	,343	-,147
		BP	,133	1,000	-,390	-,849
		AK	,343	-,390	1,000	,647
		PDRB	-,147	-,849	,647	1,000
	Covariances	KP	,001	,000	,001	-,001
		BP	,000	,008	-,004	-,022
		AK	,001	-,004	,014	,022
		PDRB	-,001	-,022	,022	,086

a. Dependent Variable: Kemiskinan

### Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	PDRB	BP	AK	KP
1	1	4,918	1,000	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,082	7,755	,00	,00	,00	,00	,59
	3	,001	98,947	,00	,00	,07	,13	,25
	4	8,62E-005	238,891	,05	,03	,34	,27	,16
	5	7,28E-006	821,808	,95	,96	,59	,60	,00

a. Dependent Variable: Kemiskinan

### Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1,2504	1,4524	1,3594	,06949	10
Std. Predicted Value	-1,568	1,339	,000	1,000	10
Standard Error of Predicted Value	,009	,021	,014	,004	10
Adjusted Predicted Value	1,2389	1,4506	1,3490	,08051	9
Residual	-,02698	,02106	,00000	,01587	10
Std. Residual	-1,267	,989	,000	,745	10
Stud. Residual	-1,515	1,813	,139	1,084	9
Deleted Residual	-,03859	,08417	,01343	,04196	9
Stud. Deleted Residual	-1,843	2,770	,168	1,392	9
Mahal. Distance	,810	8,100	3,600	2,741	10
Cook's Distance	,002	2,995	,557	1,040	9
Centered Leverage Value	,090	,900	,400	,305	10

a. Dependent Variable: Kemiskinan

### Scatterplot

Dependent Variable: Kemiskinan

